

PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN PENGELUARAN PENDIDIKAN PADA KELUARGA DENGAN ANAK DISABILITAS

Dini Pratiningtyas

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: dinipratiningtyas@gmail.com

Abstrak

Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di tingkat global maupun nasional. Salah satu faktor yang menghambat anak disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan adalah keterbatasan anggaran pendidikan di rumah tangga. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada keluarga dengan anak usia sekolah dan disabilitas dengan menggunakan data SUSENAS BPS 2018 yang meliputi 1.051 rumah tangga di Indonesia. Hasil pengujian *Ordinal Least Square* (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar dan yang tidak. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah program khusus untuk meringankan kendala anggaran pendidikan pada keluarga dengan anak-anak disabilitas sehingga partisipasi sekolah anak-anak dari kelompok ini dapat meningkat, dan kemiskinan yang berhubungan dengan status disabilitas dapat dikurangi.

Kata kunci: Anak Disabilitas, Bantuan Tunai Bersyarat, Kemiskinan, Program Indonesia Pintar.

Abstract

The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children is the educational budget constraint of families with disabled children. Since 2014 the Government of Indonesia has implemented Program Indonesia

| | |
|----------------------|---|
| How to cite: | Dini Pratiningtyas (2022) Program Indonesia Pintar Dan Pengeluaran Pendidikan Pada Keluarga Dengan Anak Disabilitas, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.15119 |
| E-ISSN: | 2548-1398 |
| Published by: | Ridwan Institute |

Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study examines the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education expenditure of families with school-aged and disabled children by applying cross section data of 1,051 households in Indonesia from the SUSENAS BPS 2018. The Ordinary Least Square (OLS) test indicates that there is no significant difference in the education expenditure per schooled child between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government has to design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated.

Keywords: *Children with Disabilities, Conditional Cash Transfer, Poverty, Program Indonesia Pintar.*

Pendahuluan

Education for All menjadi salah satu permasalahan global yang hingga saat ini belum terselesaikan. “*Inclusive and quality education for all*” merupakan salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* dengan tujuan menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Kelompok disabilitas termasuk ke dalam kelompok yang mengalami eksklusi dari pendidikan lebih besar dibanding yang lain.

Status disabilitas sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan marginalisasi. Di negara berkembang, status disabilitas ditemukan sangat berkorelasi dengan kemiskinan (Filmer, 2008; Bank L & Pollack, 2014; Pinilia, 2015; Bella & Dartanto, 2016). Selain itu, beberapa temuan juga menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bersekolah, periode lama sekolah yang lebih pendek, serta kemungkinan putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas (Harjanto, et al., 2017; Mizunoya, et al., 2018; UNESCO, 2018).

Banyak faktor yang membuat anak disabilitas mengalami kesulitan menikmati layanan pendidikan, salah satunya adanya keterbatasan anggaran pendidikan dalam rumah tangga. Keluarga dengan ekonomi terbatas yang memiliki beberapa anak seringkali mengutamakan anak tanpa disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dengan asumsi bahwa pendidikan akan menjadi kurang penting untuk anak dengan disabilitas, sehingga anak disabilitas memiliki kesempatan bersekolah lebih kecil dibandingkan saudaranya yang tanpa disabilitas (UNICEF, 2013). Bagi anak disabilitas anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan memang jauh lebih besar dibandingkan anak tanpa disabilitas. Tambahan biaya tersebut biasanya digunakan untuk menyiapkan guru terlatih, kelas yang

lebih kecil, atau peralatan khusus (Gruber, 2011). Sehingga tidak mengherankan terjadi kendala anggaran pendidikan yang sering dijumpai pada rumah tangga yang berada di kelompok miskin dan rentan miskin untuk menyekolahkan anak mereka dengan disabilitas.

Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam layanan pendidikan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana pada pasal 10 dengan jelas tertulis bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Kemudian untuk memfasilitasi hal tersebut, pemerintah memberikan dua pilihan. Anak disabilitas usia sekolah diberikan kesempatan untuk memutuskan akan menempuh pendidikan di sekolah reguler (inklusi) ataupun di Sekolah Luar Biasa (SLB). Untuk SLB diatur dalam dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya, masih sangat terbatasnya jumlah SLB di tiap provinsi semakin memperbesar hambatan anak disabilitas untuk menempuh pendidikan. Dari 2209 SLB yang ada di tahun 2019, hanya 320 yang berstatus sebagai sekolah negeri (Penyusun, 2019), sehingga keluarga dengan anak disabilitas harus memasukkan anaknya di SLB swasta dengan biaya yang lebih mahal.

Pemerintah telah menyediakan bantuan pendidikan dari sisi penawaran yang mana telah menyediakan anggaran khusus untuk anak-anak disabilitas yang bersekolah di SLB. Selain mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SLB juga menerima bantuan yang anggarannya dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit. PKLK) seperti Bantuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Bantuan Operasional Pendidikan. Namun, anggaran tersebut semakin menurun sejak tahun 2018. Di tahun 2018, proporsi alokasi anggaran untuk Pembinaan Pendidikan Khusus sangat minim yaitu hanya 2,08% dari total anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nilainya sebesar Rp39,43 triliun.

Salah satu bantuan pemerintah yang diberikan dibidang pendidikan dari sisi permintaan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Secara umum, dengan adanya program ini diharapkan dapat meringankan hambatan dalam anggaran pendidikan sehingga peserta didik yang sebelumnya putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikannya. *Dalam* kurun waktu 2014–2018 pemerintah telah mengalokasi anggaran PIP sebesar Rp42,83 triliun dan pada 2018 dengan jumlah sasaran penerima PIP mencapai 18,74 juta siswa dengan total anggaran Rp9,71 triliun (Tim Redaksi, 2019). Meskipun tidak secara khusus menjadi target prioritas dalam program ini tetapi berdasarkan kajian dari Zamjani, et al. (2019) menyatakan bahwa keluarga dan sekolah yang memiliki anak disabilitas merasakan dampak positif dengan adanya PIP.

PIP sendiri masuk ke dalam kategori Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), dimana penerima bantuan ini harus mendaftarkan dirinya ke pendidikan formal/informal. Penelitian yang berhubungan langsung dengan BTB dan PIP juga telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti permasalahan persyaratan, proses dan administrasi program (Herlinawati, et al., 2018). Studi yang mencoba mengaitkan manfaat PIP pada anak disabilitas sangat terbatas, salah satunya

adalah studi yang di lakukan oleh Zamjani, et al. (2019) dengan metode kualitatif dan dilakukan hanya pada enam wilayah di Indonesia.

Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan menggunakan pengujian secara empiris untuk mengetahui hubungan Program Indonesia Pintar terhadap pengeluaran pendidikan pada keluarga yang memiliki anak disabilitas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan sampel yang lebih luas serta menambahkan karakteristik rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data cross-sectional berupa data mikro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP) dan modul Konsumsi/Pengeluaran yang dilaksanakan pada bulan September 2018 dengan unit analisis rumah tangga yang memiliki anak disabilitas usia sekolah (7-21 tahun).

Berdasarkan data SUSENAS tersebut, terdapat 74.019 sampel rumah tangga yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria sampel rumah tangga yang memiliki setidaknya satu orang anak disabilitas usia sekolah dan memiliki pengeluaran pendidikan lebih dari Rp0,-. Setelah seleksi, diperoleh 1.051 unit rumah tangga sebagai sampel penelitian.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada studi Sari & Tanaka (2019) yaitu menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat hubungan antara status penerima PIP terhadap pengeluaran pendidikan per anak sekolah dalam rumah tangga. Model regresi yang digunakan disajikan sebagai berikut dimana i adalah unit analisa rumah tangga:

$$\begin{aligned}
 \lneducexpend_schoolchild_i = & \beta_0 + \beta_1 dpip_i + \beta_2 dpkh + \\
 & \beta_3 \lnincap_expend_i + \beta_4 deduc_head_i + \beta_5 djob_head_i + \\
 & \beta_6 numsibling_i + \beta_7 durban_i + \beta_8 pip_capexpend_i + \\
 & \beta_9 dregion_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots (1)
 \end{aligned}$$

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengeluaran pendidikan per anak sekolah yang disajikan dalam bentuk logaritma (*lneducexpend_schoolchild*). Kemudian variabel bebas utamanya adalah dummy status penerima PIP (*dpip*, 1= rumah tangga penerima PIP).

Adapun variabel bebas lainnya yang digunakan untuk kontrol dalam penelitian ini adalah dummy status penerima bantuan PKH (*dpkh*, 1= rumah tangga penerima PKH), total pengeluaran per kapita yang dinyatakan dalam logaritma natural (*lnincap_expend*), dummy tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga-KRT (*deduc_head*, 1= pendidikan tertinggi adalah SMA ke atas), dummy status bekerja kepala rumah tangga (*djob_head*, 1= bekerja), jumlah saudara yang dimiliki (*numsibling*), dummy perkotaan/ pedesaan (*durban* 1=perkotaan), dummy regional wilayah Indonesia Barat/Timur (*dregion* 1=barat).

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa status sebagai penerima PIP memiliki hubungan positif dalam meningkatkan pengeluaran pendidikan rumah tangga. Sementara itu, hipotesis untuk masing-masing variabel kontrol dijelaskan sebagai berikut. Rumah tangga penerima PKH yang diharapkan menghasilkan hubungan yang positif dengan

pengeluaran pendidikan. Sasmito (2021) menemukan bahwa terdapat dampak signifikan antara pemberian PKH terhadap total pengeluaran pendidikan.

Total pengeluaran rumah tangga mempunyai hubungan positif pada total pengeluaran rumah tangga terhadap pengeluaran pendidikan di rumah tangga tersebut. Dengan asumsi bahwa pendidikan merupakan barang normal, maka peningkatan pendapatan rumah tangga akan menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dalam rumah tangga tersebut.

Peneliti mengharapkan hasil positif dan signifikan pendidikan KRT serta wilayah rumah tangga, dimana KRT yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki konsumsi yang lebih banyak pada pendidikan (Wuryandari, 2015; Phon, 2018). Kemudian pada penelitian Phon (2018) menemukan bahwa rumah tangga yang berada di perkotaan menganggap pentingnya les privat sehingga pengeluaran pendidikannya menjadi lebih tinggi dibanding rumah tangga yang tinggal di pedesaan.

Sedangkan untuk status bekerja KRT serta jumlah saudara yang ada dalam rumah tangga diharapkan adanya hasil yang negatif. Dimana semakin banyak jumlah saudara maka akan semakin sedikit pengeluaran pendidikan rumah tangga (Ayu, 2020; Rizk & Abou-Ali, 2016). Pada studi Wuryandari (2015) ditemukan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki presentase pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki pekerjaan.

Ditambahkan pula variabel interaksi antara dummy penerima PIP dan total pengeluaran rumah tangga perkapita yang diharapkan memiliki hubungan yang signifikan. Terakhir, penulis memasukkan dummy regional untuk melihat ketimpangan pengeluaran pendidikan di masing-masing regional dengan membagi Indonesia menjadi regional Barat mencakup pulau Sumatera, Jawa, serta Bali, sedangkan regional Timur adalah wilayah di luar tiga pulau tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Pengeluaran pendidikan rumah tangga yang disajikan merupakan pengeluaran per siswa. Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata presentase pengeluaran pendidikan per siswa dalam rumah tangga yaitu 12,75%, dengan maksimumnya 16,62% dan minimumnya adalah 8,61%. Sementara itu untuk kondisi ekonomi rumah tangga total pengeluaran rumah tangga per kapita pada tahun 2018 memiliki rata-rata sebesar 16,07% dengan minimum adalah 14,53% dan maksimumnya 18,25% dengan standar deviasi 0,640.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Data Penelitian

| Variabel | Rata-rata | Standar deviasi | Min | Max |
|------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| lneducexpend_schoolchild (%) | 12.754 | 1.143 | 8.613 | 16.622 |
| dpip* (1=menerima pip) | 0.226 | 0.419 | 0 | 1 |

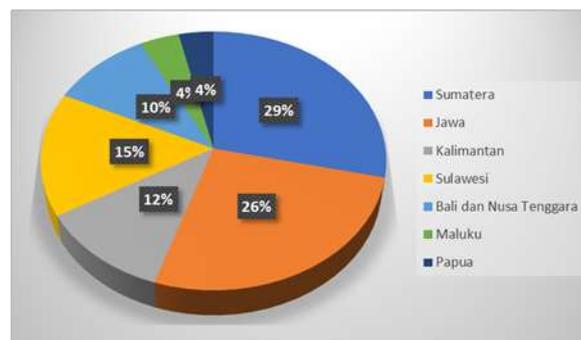
| | | | | |
|--|--------|-------|--------|--------|
| dpkh* (1=menerima pkh) | 0.226 | 0.419 | 0 | 1 |
| lncap_expend (%) | 16.066 | 0.633 | 14.531 | 18.246 |
| deduc_head* (1=jenjang pendidikan >SMA) | 0.0856 | 0.280 | 0 | 1 |
| djob_head* (1=bekerja) | 0.940 | 0.237 | 0 | 1 |
| numsibling (jumlah anak) | 1.603 | 1.277 | 0 | 7 |
| durban* (1=perkotaan) | 0.450 | 0.498 | 0 | 1 |
| pip_capexpend (%) | 3.571 | 6.608 | 0 | 17.582 |
| dregion* (1=barat) | 0.499 | 0.500 | 0 | 1 |

Sumber: olahan penulis

Pada karakteristik demografi menunjukkan jumlah saudara yang dimiliki dalam rumah tangga paling banyak adalah 7 orang dan minimumnya 0 atau tidak memiliki saudara, dengan standar deviasi sebesar 1,29.

Berdasarkan data SUSENAS bulan September 2018 dapat dilihat beberapa hal seperti sebaran anak disabilitas berdasarkan pulau tempat tinggal, kelompok pendapatan, dan kelas yang sedang diikuti saat ini.

Gambar 1 menunjukkan sebaran sampel anak disabilitas usia sekolah berdasarkan pulau tempat tinggal, terlihat tiga pulau terbesar yang memiliki jumlah anak disabilitas usia sekolah adalah pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.



Gambar 1. Sebaran Anak Disabilitas Menurut Pulau Yang Ditinggali

Sumber: olahan penulis

Kemudian Gambar 2 memperlihatkan sebaran rumah tangga penerima PIP berdasarkan kelompok pendapatan. Hal yang menarik adalah terdapat indikasi bahwa keluarga dengan anak disabilitas yang berada di kelompok non-miskin juga mendapatkan bantuan PIP. Proporsi rumah tangga non-miskin yang menerima PIP sebesar 36,55% dari total penerima PIP pada tahun 2018.



Gambar 2. Sebaran rumah tangga penerima PIP Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Sumber: olahan penulis

Lebih jauh pada tabel 4 dapat dilihat bahwa dari ketiga kelompok pendapatan (Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, 2019), jumlah keluarga non-miskin yang memiliki anak disabilitas sebanyak 608 rumah tangga dan memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp295.878,- dan Rp16.200.000,-. Pada rumah tangga miskin dan rentan miskin pengeluaran pendidikan per anak sekolah rata-rata sebesar Rp300.806,- dan Rp420.129,-. Sedangkan untuk rata-rata total pengeluaran per kapita pada kelompok miskin dan rentan miskin sebesar Rp4.112.957,- dan Rp6.590.446,-.

Apabila dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok miskin (terdiri dari rumah tangga miskin dan rentan miskin) dan kelompok non-miskin, maka rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga untuk kelompok miskin adalah sebesar Rp360.467,- dan pengeluaran pendidikan untuk rumah tangga non-miskin adalah Rp925.878,-

Tabel 2

Deskriptif Pengeluaran Pendidikan Per Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Kelompok Pendapatan

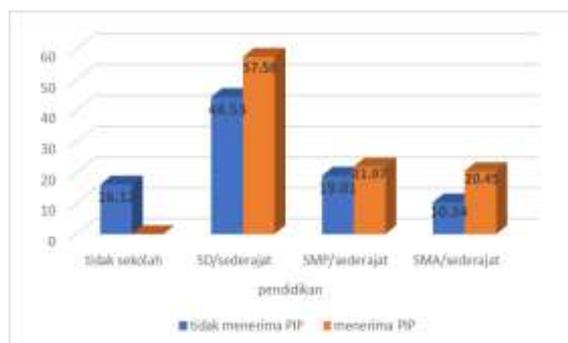
| Variables | Observasi | Rata-rata |
|------------------|-----------|------------|
| 1. Miskin | 161 | 300.805,70 |
| 2. Rentan miskin | 282 | 420.128,60 |
| 3. Non-miskin | 608 | 925.877,90 |
| 1. Miskin | 161 | 4.112.957 |
| 2. Rentan miskin | 282 | 6.590.446 |
| 3. Non-miskin | 608 | 16.200.000 |

Sumber: olahan penulis

Untuk melihat apakah perbedaan rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga antara kelompok miskin dan non-miskin dilakukan uji t-test yang disajikan pada tabel 8 Hasil uji t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran rumah tangga pendidikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara kelompok rumah tangga miskin (miskin dan rentan miskin) dengan non miskin.

Pada gambar 3 ditunjukkan bahwa rumah tangga penerima PIP dari kelompok anak disabilitas paling besar berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 57.58%.

Sementara pada tabel 5 memperlihatkan bahwa lebih dari 50% rumah tangga dengan anak disabilitas yang menjadi penerima bantuan PIP juga menerima bantuan PKH. Bantuan PKH sendiri ditujukan kepada kelompok rumah tangga miskin dan rentan miskin, sehingga besar kemungkinan rumah tangga yang mendapatkan bantuan PIP juga mendapatkan bantuan PKH.



Gambar 3. Sebaran Anak Disabilitas Yang Menerima Bantuan PIP Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: olahan penulis

Selanjutnya tabel 3 menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga yang berada di wilayah pedesaan yaitu sebanyak 578 rumah tangga (atau 55% dari total sampel). Rumah tangga yang tinggal di pedesaan memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp393.994,- dan Rp9.456.994,-.

Apabila dilakukan uji t-test untuk rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga di perkotaan dan pedesaan terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran pendidikan antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 3

Tabulasi Silang Rumah Tangga Dengan Anak Disabilitas Sebagai Penerima PIP dan PKH Tahun 2018

| Bantuan PIP | Bantuan PKH | | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Non-Penerima | Penerima | |
| Non-Penerima | 717 (88,19%) | 96 (11,81%) | 813 (100%) |
| Penerima | 96 (40,34%) | 142 (59,66%) | 238 (100%) |
| Total | 813 (77,35%) | 238 (22,65%) | 1.051 (100%) |

Sumber: olahan penulis

Tabel 4
Deskriptif Pengeluaran Pendidikan per-Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per-Kapita Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

| Variables | Obs. | Rata-rata |
|-------------------------------------|------|------------|
| Pengeluaran pendidikan/anak sekolah | | |
| 1. Perkotaan | 473 | 1.061.546 |
| 2. Pedesaan | 578 | 393.993,90 |
| Total pengeluaran/kapita | | |
| 1. Perkotaan | 473 | 14.600.000 |
| 2. Pedesaan | 578 | 9.456.994 |

Sumber: olahan penulis

Berdasarkan lokasi regional Barat dan Timur Indonesia, rumah tangga di bagian Barat Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita masing-masing sebesar Rp846.776,- dan Rp12.400.000,-. Sedangkan, rumah tangga di bagian Timur Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran pendidikan per anak sekolah dan total pengeluaran per kapita yang lebih rendah, masing-masing sebesar Rp542.362,- dan Rp11.100.000,- (lihat tabel 7).

Lebih jauh lagi apabila dilakukan uji t-test antara rata-rata pengeluaran pendidikan rumah tangga di Barat dan Timur Indonesia diperoleh hasil yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran pendidikan di Barat dan Timur Indonesia (lihat tabel 10)

Tabel 5
Deskriptif Pengeluaran Pendidikan per-Anak Sekolah dan Total Pengeluaran Per-Kapita Berdasarkan Regional

| Variables | Obs. | Rata-rata |
|-------------------------------------|------|------------|
| Pengeluaran pendidikan/anak sekolah | | |
| 1. Regional Barat | 525 | 846.776,30 |
| 2. Regional Timur | 526 | 542.361,50 |
| Total pengeluaran/kapita | | |
| 1. Regional Barat | 525 | 12.400.000 |
| 2. Regional Timur | 526 | 11.100.000 |

Sumber: olahan penulis

Berdasarkan analisa deskriptif dan uji t-test yang dilakukan di atas, untuk analisa inferensial dengan menggunakan persamaan regresi (1) akan dimasukkan tiga variabel *dummy* sebagai variabel independen, yaitu: (i) variabel *dummy* wilayah perkotaan-pedesaan, (ii) variabel *dummy* regional; dan (iii) variabel *dummy* status miskin.

Tabel 6
Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan
Per-Anak Sekolah dan Wilayah Perkotaan/Pedesaan

| Group | Obs | Mean | Std. Err. | Std. Dev. | [95% Conf. Interval] | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 0 | 578 | 12.406 | 0.041 | 1.004 | 12.324 | 12.488 |
| 1 | 473 | 13.178 | 0.053 | 1.158 | 13.073 | 13.283 |
| combined | 1.051 | 12.753 | 0.035 | 1.142 | 12.684 | 12.822 |
| diff | | -0.771 | 0.066 | | -0.902 | -0.640 |
| diff = mean(0) - mean(1) | | | | | | t = -11.565 |
| Ho: diff = 0 | | | | Satterthwaite's degrees of freedom = 1049 | | |
| Ha: diff < 0 | | Ha: diff != 0 | | Ha: diff > 0 | | |
| Pr(T < t) = 0.0000 | | Pr(T > t) = 0.0000 | | Pr(T > t) = 1.0000 | | |

Sumber: olahan penulis

Tabel 7
Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan
Per-Anak Sekolah dan Regional

| Group | Obs | Mean | Std. Err. | Std. Dev. | [95% Conf. Interval] | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------|
| 0 | 526 | 12.560 | 0.048 | 1.118 | 12.464 | 12.656 |
| 1 | 525 | 12.947 | 0.049 | 1.135 | 12.849 | 13.044 |
| combined | 1.051 | 12.753 | 0.035 | 1.142 | 12.684 | 12.822 |
| diff | | -0.386 | 0.069 | | -0.522 | -0.250 |
| diff = mean(0) - mean(1) | | | | | | t = -5.562 |
| Ho: diff = 0 | | | | Satterthwaite's degrees of freedom = 1049 | | |
| Ha: diff < 0 | | Ha: diff != 0 | | Ha: diff > 0 | | |
| Pr(T < t) = 0.0000 | | Pr(T > t) = 0.0000 | | Pr(T > t) = 1.0000 | | |

Sumber: olahan penulis

Tabel 8
Hasil Uji T-test Pada Variabel Pengeluaran Pendidikan
Per-Anak Sekolah dan Status Miskin

| Group | Obs | Mean | Std. Err. | Std. Dev. | [95% Conf. Interval] | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 0 | 608 | 13.050 | 0.046 | 1.135 | 12.960 | 13.141 |
| 1 | 443 | 12.346 | 0.048 | 1.021 | 12.251 | 12.441 |
| combined | 1.051 | 12.753 | 0.035 | 1.142 | 12.684 | 12.822 |
| diff | | 0.704 | 0.068 | | 0.571 | 0.838 |
| diff = mean(0) - mean(1) | | | | | | t = 10.3618 |
| Ho: diff = 0 | | | | Satterthwaite's degrees of freedom = 1049 | | |
| Ha: diff < 0 | | Ha: diff != 0 | | Ha: diff > 0 | | |
| Pr(T < t) = 1.0000 | | Pr(T > t) = 0.0000 | | Pr(T > t) = 0.0000 | | |

Sumber: olahan penulis

Analisis Inferensial

Hasil regresi antara status penerima PIP terhadap pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan menggunakan OLS pada persamaan 1 dan hasil estimasi disajikan dalam tabel 9.

Pada kolom (1) sampai dengan (4) di tabel 11 terlihat bahwa status sebagai penerima PIP tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengeluaran pendidikan per anak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran pendidikan antara keluarga yang memiliki anak disabilitas usia sekolah yang menerima PIP dengan keluarga yang tidak menerima PIP.

Analisis dari hasil yang tidak signifikan ini diduga karena besaran dana PIP tidak cukup besar sehingga tidak membuat perbedaan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara rumah tangga yang mendapat bantuan PIP dan yang tidak menerima. Mengingat dana untuk biaya personal dan pendidikan anak disabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas.

Tabel 9
Hubungan PIP terhadap Total Pengeluaran Pendidikan Per Anak Sekolah Dalam Rumah Tangga

| Variabel | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dpip | 0.07 (0.08) | 2.97 (2.14) | 3.05 (2.16) | -0.01 (0.12) |
| dpkh | 0.09 (0.08) | 0.08 (0.08) | 0.09 (0.08) | 0.11 (0.08) |
| lncap_expend | 0.61*** (0.06) | 0.64*** (0.07) | 0.63*** (0.07) | 0.63*** (0.09) |
| deduc_head | 0.29** (0.13) | 0.28** (0.13) | 0.30** (0.13) | 0.31** (0.13) |
| djob_head | -0.12 (0.15) | -0.12 (0.15) | -0.10 (0.14) | -0.10 (0.14) |
| numsibling | -0.10*** (0.03) | -0.09*** (0.03) | -0.09*** (0.02) | -0.09*** (0.02) |
| durban | 0.53*** (0.06) | 0.52*** (0.06) | 0.48*** (0.06) | 0.49*** (0.06) |
| pip_capexpend | | -0.18 (0.14) | -0.19 (0.14) | |
| dregion | | | 0.21*** (0.06) | 0.20*** (0.06) |
| dpoor | | | | 0.03 (0.10) |
| pip_poor | | | | 0.12 |

| | | | | |
|--------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | (0.15) |
| Constant | 2.98*** | 2.50** | 2.50** | 2.44* |
| | (1.02) | (1.11) | (1.11) | (1.45) |
| Observations | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
| R-squared | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |

Sumber: olahan penulis

Jika dilihat dari gambar 3 di atas diketahui bahwa proporsi anak disabilitas yang menerima bantuan PIP dalam penelitian ini sebagian besar berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebesar 57,58%, dimana besaran dana PIP dapat dikatakan terlalu kecil, hanya sebesar Rp450.000,- per tahun per peserta didik.

Menurut penelitian Chasson, Harris, & Neely (2007) justru di usia-usia awal seperti usia sekolah dasar inilah anak disabilitas lebih membutuhkan biaya yang tinggi. Hal ini terkait dengan intervensi/terapi pada anak usia sekolah dasar yang akan bermanfaat untuk usia selanjutnya. Selain itu pada usia sekolah dasar anak disabilitas lebih membutuhkan guru pendamping dalam proses belajar mengajar agar hasil belajar lebih maksimal dibandingkan anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang lebih mandiri dalam belajar. Biaya untuk guru pendamping ini tidaklah murah dan tidak semua sekolah reguler menyediakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pendidikan pada usia awal pendidikan relatif lebih besar dibandingkan dengan usia pendidikan menengah.

Selain itu, pengeluaran pendidikan untuk anak akan semakin meningkat ketika pendapatan keluarga juga meningkat dengan asumsi bahwa pendidikan adalah barang normal (Tilak, 2002; Wuryandari, 2015; Rizk & Abou-Ali, 2016; Phon, 2018; Ayu, 2020). Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pendidikan rumah tangga per kapita yang positif signifikan di semua estimasi. Artinya ketika terjadi peningkatan 1% total pengeluaran rumah tangga perkapita maka akan meningkatkan konsumsi pendidikan per anak sekolah sebesar 0,63% dalam rumah tangga tersebut (kolom 3).

Untuk melihat hubungan antara status penerima PIP dengan pendapatan rumah tangga, dimasukkan variabel interaksi antara dummy penerima PIP dan total pengeluaran per kapita rumah tangga (variabel *pip_capexpend* pada kolom 3). Hasil regresi menunjukkan variabel interaksi tidak signifikan, artinya hubungan antara pengeluaran pendidikan rumah tangga dengan status penerima PIP tidak berbeda dengan perubahan pengeluaran per kapita rumah tangga.

Kemudian untuk menangkap respon yang berbeda di setiap kelompok pendapatan rumah tangga, dengan membagi kelompok pendapatan rumah tangga menjadi 2 kelompok yaitu rumah tangga miskin dan rentan miskin (*dummy poor*= 1) dan rumah tangga nonmiskin (*dummy poor*= 0) – pada kolom (4). Ada pun variabel interaksi antara dummy penerima PIP dan status pendapatan adalah variabel *pip_poor*. Hasil regresi menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok pendapatan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengeluaran pendidikan pada rumah yang menerima PIP maupun tidak.

Berdasarkan hasil estimasi ditunjukkan bahwa koefisien pendidikan kepala rumah tangga memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran pendidikan

per siswa di semua estimasi, sehingga jenjang pendidikan kepala keluarga dapat menjadi faktor penting dalam rumah tangga dalam belanja pendidikan. Dapat diartikan terjadi perbedaan yang signifikan antara kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan terakhir lebih tinggi dari jenjang SMA terhadap konsumsi pendidikan per anak sekolah dibandingkan rumah tangga yang kepala keluarganya hanya lulusan SMA ke bawah.

Proksi ukuran rumah tangga di dalam penelitian ini menggunakan jumlah saudara yang dimiliki oleh anak disabilitas di dalam keluarga. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengeluaran pendidikan. Dengan adanya tambahan 1 orang saudara maka akan menurunkan pengeluaran pendidikan per anak sekolah di dalam rumah tangga sebesar 9% (kolom 3).

Selanjutnya berdasarkan letak wilayah rumah tangga, didapatkan koefisien yang signifikan positif. Hal ini berarti pengeluaran pendidikan rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang berada di pedesaan.

Berdasarkan regional wilayah, terdapat perbedaan signifikan antara pengeluaran pendidikan rumah tangga di wilayah Barat dan Timur Indonesia, dimana rumah tangga yang berada di regional Barat mengeluarkan konsumsi pendidikan lebih besar 21% dibandingkan rumah tangga yang berada di bagian Timur.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pada rumah tangga di Indonesia pada tahun 2018, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara status penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengeluaran pendidikan bagi keluarga dengan anak disabilitas. Dugaan bahwa besaran dana PIP yang terlalu kecil tidak memberikan dampak pada pengeluaran pendidikan rumah tangga. Meskipun demikian, peningkatan pengeluaran pendidikan terkait dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga perkapita, dan faktor-faktor seperti pendidikan kepala keluarga, jumlah saudara, wilayah tempat tinggal, dan regional juga berkontribusi. Perbandingan antara keluarga miskin dan nonmiskin tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengeluaran pendidikan anak disabilitas yang menerima PIP. Saran untuk pemerintah mencakup evaluasi dana PIP, perancangan program bantuan pendidikan khusus untuk anak disabilitas, dan perhatian terhadap ketepatan sasaran PIP. Keterbatasan penelitian melibatkan penggunaan data cross section tahun 2018, dan disarankan penelitian selanjutnya melibatkan data terbaru serta metode analisis yang lebih spesifik seperti Propensity Score Matching. Selain itu, disarankan untuk memasukkan data bantuan pendidikan dari sisi penawaran guna memperkaya hasil penelitian.

BIBLIOGRAFI

- Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A., & Syukriyah, D. (2014). *Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia*. Jakarta: World Bank Indonesia.
- Ayu, P. P. (2020). *Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Rumah Tangga untuk Pendidikan menurut Kelompok Pendapatan: Studi Empiris di Pendidikan Dasar di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Bank L, M., & Pollack, S. (2014). The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities: Evidence from Low and Middle Income Countries.
- Becker, G. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Becker, G., & Tomes, N. (1986). Human Capital and the Rise and fall of Families. *Journal of Labor Economics*, 1-39.
- Bella, A., & Dartanto, T. (2016). A Bad Luck: People with Disabilities (PWD) and Poverty in Indonesia. Jakarta: LMFE FEB-UI.
- Chasson, G. S., Harris, G. E., & Neely, W. J. (2007). Cost Comparison of Early Intensive Behavioral Intervention and Special Education for Children with Autism. *Journal of Child and Family Studies*, 401-413.
- Filmer, D. (2008). Disability, poverty, and Schooling in Developing Countries: Result From 14 Household Surveys. *The Worldbank Economic Review*, 141-163.
- Gruber, J. (2011). *Public Finance and Public Policy Third Edition*. USA: Worth Publisher.
- Harjanto, H., Pudjianto, B., Astuti, M., Murni, R., Husmiati, & Syawi, M. (2017). *Pengaruh Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Herlinawati, Heriyati, E., Sudiyono, & Susanto, A. B. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Holmemo, C., Acosta, P., George, T., Palacios, R. J., Pinxten, J., Sen, S., & Tiwari, S. (2020). *Berinvestasi Pada Manusia: Perlindungan Sosial Untuk Visi Indonesia 2045*. Jakarta: World Bank Indonesia.

- Jhon, E. (2019). Retrieved from Scope=Equility for disabled person: <https://www.scope.org.uk/news-and-stories/life-costs-more-for-disabled-children-and-their-families/>
- Kemdikbud. (2017). *Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2018a). *Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2018b). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemdikbud. (2018c). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kemdikbud. (2018d). *Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2018e). *Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018*. Jakarta: Kemdikbud
- Kemdikbud. (2019). *Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2020a). *Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2020b). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2021). *Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud.
- Melnychuk, M., & Solmi, F. (2017). *Family Finances and Disability: The Cost of Raising Children with Disabilities*. London: the Department of Health's Policy Research.
- Mitra, S., Palmer, M., Kim, H., Mont, D., & Groce, N. (2017). Extra costs of living with a disability: A review and agenda for research. *Disability and Health Journal*, 475-484.
- Mizunoya, S., Mitra, S., & Yamasaki, I. (2018). Disability and School Attendance In 15 Low-And-Middle-Income Countries. *World Development*.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results-Country Note: Indonesia*. Paris: OECD Publishing.

- Phon, S. (2018). Determinants of Household Expenditure on Education in Cambodia: Focusing on Children of Disadvantaged Backgrounds. *Journal of Economics and Sustainable Development*.
- Penyusun, T. (2019). *Surat Keputusan Penerima Bantuan Belajar Tahun 2019*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pinilia, M. R. (2015). Disability and Poverty: Two Related Condition, A Review of the Literature. *Revista Medica Journal*.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rizk, R., & Abou-Ali, H. (2016). *Out of Pocket Education Expenditure and Household Budget: Evidence from Arab Countries*. Giza: Economic Research Forum
- Sari, N. P., & Tanaka, R. (2019). The Effect of School Operational Assistance Program on Investment in Education by Households: Evidence from Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 65, 149–168.
- Sasmito, Y. (2021). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 75-95.
- Tilak, J. (2002). *Determinants of Household Expenditure on Education in Rural India*. New Delhi: National Council of Applied Economic Research.
- Tim Redaksi. (2019, Mei). *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Media Komunikasi dan Inspirasi, pp. 1-34.
- UNESCO. (2018). Education and Disability: Analysis of data from 49 Countries. UNESCO.
- UNICEF. (2013). Children and Young People with Disabilities.
- UNICEF. (2019). *Cash Transfer Programme for Children with Disabilities*. Damascus: UNICEF.
- Wuryandari, R. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 27-42.
- Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Lima Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15-32.

Copyright holder:

Dini Pratiningtyas (2022)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

